

---

## Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

Klarita Novela Wenda<sup>1</sup>, Felomena Marselina Wemaf<sup>2</sup>, Fransisca Takin<sup>3</sup>, Eni Setianingsih<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom (STIE), Indonesia

Email: [novelawenda@gmail.com](mailto:novelawenda@gmail.com), [felomenawemaf04@gmail.com](mailto:felomenawemaf04@gmail.com),

[fransiscatakin04@gmail.com](mailto:fransiscatakin04@gmail.com), [enisetianingsih@gmail.com](mailto:enisetianingsih@gmail.com)

---

### Abstrak

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di banyak daerah, termasuk Provinsi Papua. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi di provinsi ini mencerminkan adanya masalah ekonomi yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada periode 2015 hingga 2021. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data berupa regresi linier sederhana untuk menilai korelasi antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Setiap peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung memperburuk keadaan kemiskinan dengan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan jumlah penduduk miskin secara drastis tidak dapat dicapai hanya dengan menjaga rasio Gini yang stabil. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa inflasi turut meningkatkan garis kemiskinan, sehingga memperburuk kondisi masyarakat miskin. Berdasarkan temuan penelitian, upaya Provinsi Papua untuk menanggulangi kemiskinan harus difokuskan pada penurunan ketimpangan pendapatan. Untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil, kebijakan yang disarankan meliputi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengendalian inflasi secara efektif.

**Kata Kunci:** Ketimpangan pendapatan; kemiskinan, Rasio Gini

### Abstract

*Income inequality is one of the main causes of poverty in many regions, including Papua Province. The extremely high levels of poverty and income inequality in this province reflect a serious economic issue. This study aims to examine the impact of income inequality on poverty levels in Papua Province during the period from 2015 to 2021. The secondary data used in this research were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Papua Province. The study employs a quantitative approach using simple linear regression analysis to evaluate the correlation between poverty levels and income inequality, measured by the Gini ratio. The findings reveal that income inequality has a significant and negative effect on poverty levels in Papua Province. Every increase in income inequality tends to reduce people's welfare, thereby worsening poverty conditions. The Gini ratio, which tends to be stable at a moderate level, is not enough to significantly reduce the number of poor people. These findings also reveal that inflation is another factor that worsens poverty conditions by increasing the poverty line. The conclusion of this study is that reducing income inequality should be the main focus in poverty alleviation efforts in Papua Province. Policy recommendations include empowering the local economy, increasing the income of the lower class, and controlling inflation to create a more equitable distribution of income.*

**Keywords:** Income inequality; poverty, Gini ratio

---

## PENDAHULUAN

Manusia telah berjuang melawan kemiskinan sejak umat manusia ada (Ningsih et al., 2023; Wirawan & Arka, 2015). Masalah kemiskinan dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan masalah sosial di seluruh dunia. Meskipun dampaknya berbeda-beda di setiap negara, kemiskinan kini menjadi perhatian global (Hidayat, 2021; Mukhamad, 2018; Rorong, 2022; Royadi et al., 2023). Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, sebagian orang tidak mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan (Apristha & Sudibia, 2024; Widayatsari, 2016). Tingkat kemakmuran suatu negara ditentukan oleh distribusi pendapatan nasionalnya, termasuk apakah pendapatan tersebut tersebar secara adil atau tidak merata, selain ditentukan oleh ukuran dan pendapatan per kapitanya (Abdulah, 2013; Dwiputra, 2018).

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sedang menghadapi keterpurukan, menempati urutan pertama dalam tingkat kemiskinan dan memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang sedang. Persoalan ini erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Tabel 1 menunjukkan data mengenai situasi kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga 2021.

**Tabel 1. Kondisi Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	402.031	3.149.375	859.15	28,17
2016	427.176	3.207.444	911.33	28,54
2017	457.541	3.265.202	897.69	27,62
2018	499.463	3.322.526	917.63	27,74
2019	540.099	3.379.302	926.36	27,53
2020	562.992	4.303.707	911.37	26,64
2021	591.959	4.355.445	920.44	26,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2015-2021

Tabel 1 mengenai situasi kemiskinan di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 926.366 jiwa, jumlah terbesar yang pernah tercatat. Tingginya garis kemiskinan di Provinsi Papua berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya.

Rendahnya pendapatan suatu rumah tangga merupakan penyebab utama kemiskinannya (Hidir & Jonyanis, n.d.; Rahayu et al., 2013). Sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki jumlah anggota keluarga signifikan, baik keadaan ekonomi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan, semakin buruk (Nisa et al., 2020).

Kemiskinan memiliki hubungan pragmatis dengan ketimpangan, artinya kemiskinan merupakan akibat dari ketimpangan atau ketimpangan memperburuk kemiskinan (Sugiyarto et al., 2015). Rasio Gini merupakan alat yang berguna untuk menilai

ketimpangan pendapatan. Ketimpangan sempurna direpresentasikan dengan nilai 1, sedangkan kesetaraan sempurna direpresentasikan dengan nilai 0. Ketimpangan sedang memiliki koefisien Gini antara 0,36 dan 0,49, ketimpangan tinggi antara 0,50 dan 0,70, serta ketimpangan rendah antara 0,20 dan 0,35 (Arsyad, 2010).

**Tabel 2. Rasio Gini Provinsi Papua 2015-2021**

Tahun	Rasio Gini
2015	0,421
2016	0,390
2017	0,397
2018	0,384
2019	0,394
2020	0,392
2021	0,397

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Berdasarkan tabel 2 mengenai rasio gini Provinsi Papua Tahun 2015-2021 dapat terlihat bahwa rasio gini rasio gini di Provinsi Papua ini tergolong sedang. Rasio gini tertinggi terjadi pada Tahun 2015. Tahun-tahun berikutnya rasio gini di Provinsi Papua mulai menurun hingga pada angka 0,397. Tercatat di Badan Pusat Statistik bahwa Provinsi Papua berada pada urutan ke 6 dan memiliki rasio gini sedang diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian Aini, (2023) dampak pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengkaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka kemiskinan di provinsi tersebut. Penelitian ini mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain ketimpangan pendapatan, pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Statistik yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah laju pertumbuhan produk regional bruto (PDRB), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio gini (GR). Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Analisis regresi data panel digunakan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2020. Model penelitian yang digunakan adalah Random Effects Model (REM). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: (1) kemiskinan tidak dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi; (2) kemiskinan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh variabel pendidikan; (3) kemiskinan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel pengangguran; dan (4) kemiskinan tidak dipengaruhi oleh variabel ketimpangan pendapatan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak menyoroti hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pada tingkat nasional atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, penelitian ini secara spesifik menganalisis hubungan tersebut di Provinsi Papua. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik, termasuk tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dan kondisi kemiskinan yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan data terbaru yang mencakup tren ketimpangan pendapatan dan kemiskinan selama periode 2015–2021. Hal ini memberikan kontribusi

dalam memperbarui literatur terkait dinamika distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, khususnya setelah dampak perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada periode 2015–2021, memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan berdasarkan data kuantitatif dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, menjadi pedoman bagi institusi lokal, nasional, maupun internasional dalam merancang program intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya distribusi pendapatan yang merata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin yang terdampak oleh tingginya ketimpangan pendapatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kualitas atau kekhususan dampak sosial yang tidak dapat dikuantifikasi atau dijelaskan dengan metode kualitatif dapat diteliti, ditemukan, dikarakterisasi, dan dijelaskan dengan menggunakan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2016). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data ini, digunakan telaah pustaka dari beberapa buku berdasarkan catatan terkait penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

### Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu data jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada periode 2015–2021 dan data rasio gini di provinsi tersebut.

### Analisis Data

Model ekonometrika yang menggunakan persamaan regresi linier sederhana merupakan metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perekonomian mempengaruhi distribusi pendapatan. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, khususnya memanfaatkan informasi dari situs web BPS Provinsi Papua mengenai keadaan perekonomian provinsi tersebut, seperti statistik ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Setelah data terkumpul, perangkat lunak pengolahan data SPSS digunakan untuk mengolah data. Pendekatan regresi linier sederhana kemudian digunakan untuk menganalisis hasil pengolahan data.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa langkah berikut:

1. **Studi Dokumentasi**

Data dikumpulkan dari dokumen resmi yang relevan, seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dan sumber data lainnya yang memuat informasi terkait tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, rasio gini, dan indikator ekonomi lainnya selama periode 2015–2021.

2. **Sumber Data Online**

Penelitian ini memanfaatkan data yang tersedia secara daring, seperti laporan statistik tahunan yang diakses melalui situs resmi BPS serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Data ini diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan relevansinya dengan topik penelitian.

3. **Pengolahan Data Sekunder**

Data sekunder meliputi:

a. **Data Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Provinsi Papua.

b. **Data Ketimpangan Pendapatan**

Rasio gini sebagai ukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua.

c. **Data Ekonomi Pendukung**

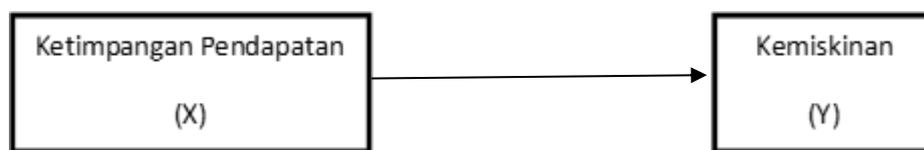
Data inflasi, upah minimum, dan produk domestik regional bruto (PDRB) yang berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

4. **Verifikasi dan Validasi Data**

Data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitasnya melalui pemeriksaan silang dengan berbagai sumber terpercaya untuk memastikan konsistensi dan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis

**Kerangka Berpikir**

Kerangka kerja model konseptual menjelaskan hubungan antara teori dan sejumlah aspek yang selama ini dianggap sebagai permasalahan yang signifikan. Gambar 1 memberikan gambaran tentang kerangka kerja konseptual dalam penelitian ini.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0: Ketimpangan Pendapatan (X) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y)

H1: Ketimpangan Pendapatan (X) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kemiskinan

Setiap tahun, jumlah penduduk miskin, yang didefinisikan sebagai mereka yang pendapatan per kapita per bulannya kurang dari ambang batas kemiskinan, cenderung meningkat. Pada tahun 2019, terdapat 926,36 ribu orang yang hidup dalam kemiskinan, jumlah tertinggi hingga saat ini. Pada tahun 2015, terdapat 859,15 ribu orang yang hidup dalam kemiskinan, jumlah terendah hingga saat ini. Tingginya garis kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya laju inflasi menjadi alasan mengapa jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 lebih banyak. Pengeluaran masyarakat meningkat karena tingginya biaya kebutuhan pokok yang disebabkan oleh tingginya laju inflasi. Sementara itu, pengeluaran masyarakat lebih besar daripada pendapatannya. Upah minimum provinsi, perluasan sektor industri dan pertanian terhadap produk nasional bruto, serta penurunan angka pengangguran merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin. Fluktuasi angka kemiskinan di Provinsi Papua terjadi sebagai dampak dari faktor-faktor ini.

### Analisis Ketimpangan Pendapatan

Di Provinsi Papua, rasio Gini cenderung menurun setiap tahunnya. Metrik yang paling krusial untuk menilai atau menghitung ketimpangan pendapatan adalah rasio Gini (Chen et al., 2014). Pada tahun 2018, rasio Gini berada pada titik terendah, yaitu 0,384, sedangkan pada tahun 2015, rasio Gini berada pada titik tertinggi, yaitu 0,421.

Pemerintah Provinsi berupaya mendorong pemerataan ekonomi dengan menggenjot kemampuan ekonomi masyarakat setempat, misalnya dengan menggalakkan usaha warung ketimbang jaringan waralaba. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua masih terus berkembang dan semakin baik.

### Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Pengujian hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan hasil uji regresi linier sederhana, dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji koefisien Regresi**

Model	B	Coefficients		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1578.285	164.026		9.622	.000
ketimpangan pendapatan	-1.695	.414	-.878	-4.098	.009

a. Dependent Variable: kemiskinan

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi ketimpangan pendapatan adalah -1,695, sedangkan nilai konstantanya adalah 1.578,285. Oleh karena itu, persamaan regresi berikut dapat dibuat untuk analisis:

$$Y = 1578.285 - 1.695X$$

Dari persamaan linier tersebut, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 1.578,285 menunjukkan bahwa nilai kemiskinan adalah 1.578,285 jika  $X = 0$  atau variabel ketimpangan pendapatan tidak ada. Berdasarkan koefisien regresi variabel ketimpangan pendapatan sebesar -1,695, kemiskinan akan berkurang sebesar 1,695 kali lipat untuk setiap penambahan satu poin variabel ketimpangan pendapatan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Persentase fluktuasi total variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model dikenal sebagai koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Kuncoro, 2013). Nilai  $R^2$  yang dihitung sebesar 0,572 menunjukkan bahwa 57,2 persen kemiskinan dipengaruhi oleh variabel ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa 57,2 persen variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketimpangan pendapatan, sedangkan 43 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pencapaian pendidikan.

### Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan memiliki signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$ . Jika dibandingkan pada t-tabel berarti t-hitung  $>$  t-tabel ( $-4,098 > 0,6664$ ). Hal ini menandakan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

Meskipun rasio ginya tergolong rendah, Provinsi Papua tetap memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Pada tahun 2021, terdapat 920.444 jiwa penduduk miskin dengan rasio gini sebesar 0,397. Tingkat pendapatan dan pengeluaran penduduk dari golongan atas dan golongan bawah hampir sama atau tidak jauh berbeda ketika rasio gini rendah. Dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat setempat, seperti dengan menggalakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui jaringan waralaba, Pemerintah Provinsi Papua berupaya untuk mendorong pemerataan ekonomi. Pemerintah mengambil langkah ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah di Provinsi Papua. Namun, angka kemiskinan di Provinsi Papua tidak menurun dengan strategi ini. Penduduk Provinsi Papua tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk masih di bawah garis kemiskinan, yang menjadi penyebabnya. Hal ini merupakan akibat dari tingginya angka inflasi di Provinsi Papua, yang menyebabkan tingginya biaya kebutuhan.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua, nilai koefisien regresi ditetapkan sebesar -4,098 dengan ambang batas signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan secara

signifikan dipengaruhi secara negatif oleh ketimpangan pendapatan. Di Provinsi Papua, semakin besar ketimpangan pendapatan antar penduduk, semakin besar pula proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Faktor utama yang menentukan kemiskinan adalah distribusi pendapatan, yang mencerminkan seberapa merata atau tidak meratanya tingkat pendapatan didistribusikan. Pendapatan per kapita rata-rata orang yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan penentu utama kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peningkatan kesenjangan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan tingkat pendapatan tenaga kerja secara tidak langsung menarik kelompok orang yang pengeluaran rata-ratanya sebelumnya di atas ambang kemiskinan untuk membelanjakan lebih sedikit dari itu.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Oktaviani et al., (2022) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa secara umum kemiskinan diartikan sebagai pendapatan seseorang yang berada di bawah ambang batas atau norma kemiskinan tertentu. Apabila pendapatan per kapita rata-rata per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut tergolong miskin. Sementara itu, perbedaan antara mereka yang berpendapatan tinggi dan rendah dikenal sebagai ketimpangan. Dalam beberapa situasi, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat, yang niscaya akan memengaruhi pendapatan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, hanya segelintir orang, khususnya 20% penduduk terkaya, yang merasakan dampak ekspansi ekonomi terhadap pendapatan.

Senada dengan penjelasan tersebut, Suparman, (2021) menyatakan bahwa kemiskinan akan berkurang apabila ketimpangan menurun karena elastisitas ketimpangan selalu bernilai positif. Menurut Affandi et al., (2017), distribusi yang tidak merata akan berdampak buruk bagi masyarakat, antara lain meningkatkan angka kemiskinan dan pada akhirnya menurunkan pembangunan ekonomi. Hasil ini juga konsisten dengan hasil sejumlah peneliti lain yang menemukan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan (distribusi pendapatan) (Badriah, 2019; Hindun et al., 2019; Suparman, 2021) Pendapatan rendah merupakan sumber utama kemiskinan, dan karena sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah memiliki banyak anggota keluarga, keadaan ekonomi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan serta kesenjangan pendapatan atau kesejahteraan menjadi semakin buruk (Maskur et al., 2023; Nisa et al., 2020).

Menurut Sugiyarto et al. (2015), terdapat hubungan pragmatis antara kemiskinan dan ketimpangan, artinya kemiskinan merupakan salah satu bentuk ketimpangan atau ketimpangan memperparah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan situasi di sejumlah provinsi di Indonesia, seperti DI Yogyakarta dan Gorontalo (indeks gini  $> 0,4$ ), yang tingkat ketimpangannya berada di atas rata-rata nasional dan cenderung meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Pada periode 2020 dan 2021, persentase penduduk miskin tampak lebih besar, dan ketimpangan ini sejalan dengan kondisi tersebut.

Lebih jauh, perbedaan regional dalam hal pendapatan per kapita, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam tingginya tingkat ketimpangan yang ditemukan di sejumlah provinsi di Indonesia. Karena variasi ini, kapasitas suatu daerah untuk mengarahkan proses pembangunan juga bervariasi. Setiap daerah memiliki tenaga kerja,

sumber daya, dan teknologi sendiri, yang mengarah pada ketimpangan regional, menurut Arsyad, (2010).

### **Konteks Wilayah Tertinggal**

Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berfokus pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi atau wilayah urban di Indonesia. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menganalisis Provinsi Papua, sebuah wilayah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi, tetapi memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang unik.

### **Fokus pada Periode Pascapandemi**

Banyak penelitian terdahulu mengkaji hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebelum pandemi COVID-19. Penelitian ini mengisi celah dengan meninjau data dari tahun 2015 hingga 2021, termasuk dampak sosial-ekonomi dari pandemi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

### **Kurangnya Pendekatan Kuantitatif dengan Data Lokal**

Sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif atau data agregat nasional untuk menganalisis ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Penelitian ini menawarkan pendekatan kuantitatif berbasis regresi linier sederhana dengan data spesifik dari Provinsi Papua, yang memberikan wawasan lebih mendalam tentang hubungan kedua variabel tersebut.

### **Minimnya Penelitian yang Mengaitkan Ketimpangan dengan Faktor Inflasi di Papua**

Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroiti ketimpangan pendapatan sebagai penyebab kemiskinan tanpa mempertimbangkan dampak inflasi sebagai variabel yang memperburuk garis kemiskinan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroiti bagaimana inflasi turut memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

### **Kurangnya Rekomendasi Kebijakan Lokal**

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih bersifat teoritis atau deskriptif tanpa memberikan rekomendasi implementasi kebijakan yang spesifik. Penelitian ini menutup kesenjangan tersebut dengan memberikan rekomendasi kebijakan lokal yang relevan, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2015-2021, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Papua. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua tergolong tinggi, sementara rasio gini tergolong sedang. Program bantuan modal bagi warga Provinsi Papua untuk menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong perekonomian provinsi dan menciptakan pemerataan, namun tidak berdampak pada kesejahteraan warga yang pendapatannya masih relatif rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya inflasi di Provinsi Papua, yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 6(1), 42–53. <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3747>
- Affandi, A., Zulham, T., & Gunawan, E. (2017). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 174–191.
- Aini, S. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Apristha, K. R. R., & Sudibia, I. K. (2024). Determinan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12119–12129.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 9(1).
- Chen, J., Si, Y., Li, F., & Zhao, A. (2014). An Analysis of Relationship Among Income Inequality, Poverty, and Income Mobility, Based on Distribution Functions. *Abstract And Applied Analysis*, 2014(1), 186564. <https://doi.org/10.1155/2014/186564>
- Dwiputra, R. M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011-2016)*. Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162867>
- Hidayat, A. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*.
- Hidir, A., & Jonyanis, J. (N.D.). Poverty Alleviation Model Of “Laut” Tribe And Structure of Economy In Indragiri Hilir Regency, Riau Province. *Ijeba (International Journal of Economic, Business And Applications)*, 2(1), 65–75.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250–265.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., & Alwi, S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jpep (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 82–95.
- Mukhamad, B. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ningsih, M., Nursini, N., & Sabir, S. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362–372. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.696>

- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018. *Sorot*, 15(1), 55–63.
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 176–189. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.76>
- Rahayu, S., Darus, H. M. M. B., & Hasyim, H. (2013). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Petani Padi (Studi Kasus: Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 2(10), 15138.
- Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(3), 398–415.
- Royadi, A. A., Hasyadi, K., & Nurhayati, I. (2023). Efektivitas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3205>
- Sugiyarto, S., Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi*, 26(2), 115–120. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suparman, S. (2021). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty In Central Sulawesi. *Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi (November 01, 2021)*.
- Widayatsari, A. (2016). *Socio-Cultural Factors Towards Poverty in The Regency Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Contribution of Indonesian Islam to The World Civilization Journal of Economics and Sustainable Development*, 7 (20), 31-39.
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 44542.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

---